



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

INTERNET MURAH UNTUK MASYARAKAT

Ahmad Budiman

Analisis Legislatif Ahli Madya
ahmad.budiman@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana melakukan lelang spektrum frekuensi radio sebesar 80 MHz di pita 1,4 GHz untuk mewujudkan internet cepat dan murah. Spektrum frekuensi 1,4 GHz akan dialokasikan Komdigi untuk layanan *Broadband Wireless Access* (BWA) bagi penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched*. Frekuensi akan digunakan untuk layanan internet rumah serta mendukung sektor pendidikan dan kesehatan.

Dirjen Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni, menjelaskan, pernyataan tersebut berdasarkan hasil kajian dari aspek teknologi yang menurut *International Telecommunication Union* (ITU), dapat memberikan aspek yang murah kepada masyarakat. Target kecepatan layanan internet bagi penyedia layanan BWA adalah 100 Mbps dengan harga Rp100 ribu hingga Rp150 ribu, namun ini bukan untuk seluler. Untuk mewujudkan internet murah solusinya dengan melelang frekuensi 1,4 GHz yang harus didahulukan. Kemungkinan target lelang ini akan dilaksanakan pada minggu ketiga Februari 2025. Spektrum 80 MHz ini akan dibagi menjadi tiga blok wilayah, yang memungkinkan tiga pemenang lelang. Namun, jumlah pemenang dapat berubah berdasarkan masukan dari masyarakat dan evaluasi teknis lebih lanjut.

Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz saat ini tengah disusun. Peraturan itu dibuat dalam rangka meningkatkan penetrasi *fixed broadband*, menyediakan layanan *Fixed Broadband* (FBB) dengan harga yang terjangkau, dan meningkatkan penggelaran serat optik. Hal ini dilakukan karena penetrasi FBB di Indonesia masih rendah, hanya 21,31 persen rumah tangga yang memiliki akses. Selain itu, kecepatan rata-rata masih 32,10 Mbps, dan harga layanan internet cepat 100 Mbps masih mahal. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah terobosan kebijakan untuk mendorong pembangunan layanan akses internet di rumah secara masif dan cepat dengan biaya yang relatif terjangkau sesuai kemampuan masyarakat.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, menjelaskan BWA yang akan dilelang kali ini berbeda dengan BWA pada spektrum frekuensi lain. BWA yang diselenggarakan ini memberikan peluang peningkatan penetrasi internet lebih baik. Harapannya Komdigi dapat mempertimbangkan secara bijak atas seluruh masukan yang diberikan termasuk dari APJII, antara lain evaluasi pentarifan yang memberikan jaminan kesehatan bagi industri ini. Selain itu, pertimbangan teknis agar performa jaringan yang dibangun memberikan kenyamanan bagi penyelenggaraan internet, sehingga *benefit* terbesar akan dirasakan masyarakat.

Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Adis Alifiawan, menambahkan, pemerintah mendorong pemerataan akses internet dengan layanan murah dan cepat ke daerah terpencil untuk meningkatkan konektivitas nasional. Internet diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru, terutama di daerah

dengan akses digital terbatas. Selain untuk kebutuhan rumah tangga internet juga akan mengalir ke sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan. Harapannya, kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas layanan publik serta mempercepat digitalisasi di sektor-sektor penting. Saat ini, regulasi sedang dalam tahap finalisasi setelah melalui konsultasi publik yang berakhir pada 2 Februari 2025. Pemerintah menargetkan kebijakan ini dapat diluncurkan sebelum pertengahan tahun agar masyarakat segera merasakan manfaatnya.

Atensi DPR

Komisi I DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan perlu memastikan kebijakan pemerintah terkait lelang spektrum frekuensi radio sebesar 80 MHz di pita 1,4 GHz, untuk mewujudkan internet cepat dan murah, dilakukan secara akuntabel dan transparan. Komisi I DPR RI juga perlu mengawasi peraturan menteri yang akan dihasilkan, sesuai dengan ruang lingkup peraturan perundang-undangan terkait telekomunikasi yang telah ada selama ini. Komisi I DPR RI juga perlu memastikan, kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan internet murah bagi masyarakat memperhatikan pertimbangan teknis performa jaringan, tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkannya, dan mendatangkan manfaat yang maksimal, terutama untuk memicu pertumbuhan ekonomi baru dan kebutuhan rumah tangga, selain internet juga akan mengalir ke sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintahan.

Sumber

cnbcindonesia.com, 18 Februari 2025;
komdigi.go.id, 18 Februari 2025;
rri.co.id, 19 Februari 2025.

Minggu ke-3 Februari
(17 s.d. 23 Februari 2025)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*